

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

Peraturan perundang - undangan yang melatarbelakangi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Sidoarjo Tahun 2021, adalah sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006 – 2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
20. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 59 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
21. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021;
22. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 42 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 96 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
23. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 51 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
24. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021;
25. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 92 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 74 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

B. Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 – 2026

Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan yang ada di Kabupaten Sidoarjo, agar lebih terarah dan berhasil guna serta berdaya saing, dengan mempertimbangkan potensi daerah, tantangan maupun ancaman di masa mendatang maka Pemerintah Kabupaten Sidoarjo bersama – sama dengan masyarakat telah menetapkan visi, misi, dan strategi dalam mencapai harapan yang ingin diwujudkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 – 2026, sebagai berikut.

1. Visi

Sebagai upaya untuk menjamin keberlanjutan pembangunan daerah, maka terlebih dahulu dilakukan telaah terhadap visi RPJPD yang diemban Kabupaten Sidoarjo dalam jangka waktu 20 tahun yakni Kabupaten Sidoarjo yang Mandiri, Sejahtera dan Madani. Visi jangka panjang dalam RPJPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2005-2025 tersebut, tentunya tidak dapat dilepaskan dari konteks lokal Sidoarjo, yang sangat dinamis, dan mengalami pergeseran-pergeseran pada beberapa sektor, oleh karena itu, penyusunan Visi Jangka Menengah, selain didasarkan pada Visi Jangka Panjang, juga tidak terlepas, atau memiliki irisan dengan konteks masa kini, atau merupakan cerminan dari kondisi masyarakat saat ini.

Berdasarkan pada permasalahan pembangunan, serta isu strategis, dengan berpegang pada Visi RPJPD Kabupaten Sidoarjo tahun 2005-2025, maka disusun sebuah cita-cita pembangunan masyarakat Sidoarjo dimasa depan. Cita-cita tersebut merupakan gambaran terwujudnya masyarakat masa depan yang sejahtera, maju, adil, makmur, dalam sebuah tatanan masyarakat yang demokratis, agamis, dan memiliki tingkat estetika yang tinggi serta berkelanjutan. Visi dan misi yang dirumuskan dalam dokumen ini merupakan dasar dari penetapan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Berdasarkan pada uraian di atas, maka cita-cita pembangunan Kabupaten Sidoarjo yang selanjutnya menjadi rumusan Visi RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 adalah :

” TERWUJUDNYA KABUPATEN SIDOARJO YANG SEJAHTERA, MAJU, BERKARAKTER DAN BERKELANJUTAN ”

Agar rumusan Visi di atas dapat diimplementasikan lebih operasional, maka perlu dijabarkan pada pokok-pokok visi berikut penjelasannya sebagaimana dituangkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel I.1
Pokok-Pokok Visi Kabupaten Sidoarjo

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan
“Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter dan Berkelanjutan”	Sidoarjo Sejahtera	Sidoarjo Sejahtera menggambarkan kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan secara ekonomi, sosial, politik dan keamanan serta segala aspek kehidupan lainnya. Hal ini dicerminkan dari tingkat pendapatan perkapita, Indeks Pembangunan Manusia serta berbagai indikator lainnya seperti kualitas pendidikan, dan kesehatan. Pembangunan yang ingin diwujudkan dalam Visi ini tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan (<i>growth</i>) semata, namun juga akan ditekankan pada aspek pemerataan (<i>equality</i>). Hal ini dimaksudkan agar hasil-hasil pembangunan tidak hanya menjadi milik kelompok masyarakat tertentu, namun menjadi hak seluruh masyarakat Kabupaten Sidoarjo tanpa terkecuali.
	Sidoarjo Maju	Sidoarjo maju merupakan manifestasi dari diksi “menjemput Perubahan”. Segala sumberdaya pemerintahan dan sumber daya alam akan dikelola dan diarahkan untuk kemajuan Sidoarjo. Kemajuan memiliki makna “terwujudnya keadaan yang lebih baik dari sebelumnya”. Sehingga target pembangunan yang belum tercapai akan

		ditingkatkan pencapaiannya, dan yang telah tercapai akan ditingkatkan capaiannya. Segala upaya peningkatan capaian pembangunan tersebut tidak lain untuk kesejahteraan Masyarakat Sidoarjo di segala bidang.
	Sidoarjo Berkarakter	Unsur penting dari konsep pembangunan <i>People Centered Development</i> atau pembangunan berpusat pada manusia adalah kokoh spiritual, mapan intelektual, kompetensi handal dan karakteristik sosial yang berpegang pada nilai agama dan nilai luhur budaya. Nilai (<i>value</i>) yang mendasari semangat juang dan pola hidup masyarakat memiliki peran penting dalam proses pembangunan. Karakteristik masyarakat kabupaten Sidoarjo yang tegas, lugas, namun tetap ramah dan hangat menjadi modal teramat besar bagi pembangunan Kabupaten Sidoarjo ke depan.
	Pembangunan Berkelanjutan	Pembangunan dilaksanakan di atas prinsip-prinsip berkelanjutan (<i>sustainable development</i>). Sidoarjo sebagai bagian dari masyarakat dunia memandang perlu untuk turut berperan aktif dalam upaya pelestarian lingkungan. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) akan menjadi prinsip pembangunan di Kabupaten Sidoarjo

Sumber Data : RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026

Keempat pokok Visi di atas, selanjutnya akan dijabarkan ke dalam Misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026. Misi pembangunan akan memperjelas dan mempertegas kemana pembangunan akan diprioritaskan dan diarahkan selama lima tahun mendatang.

2. Misi

Berdasarkan pada penjabaran Visi ke dalam pokok-pokok Visi di atas, berikut akan disajikan bagaimana keterkaitan antara Visi dengan Misi Pembangunan Kabupaten Sidoarjo selama lima tahun ke depan. Adapun keterkaitan tersebut sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel I.2

Keterkaitan Visi dengan Misi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan
“Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter dan Berkelanjutan”	Sidoarjo Sejahtera	Misi 2 : Membangkitkan Pertumbuhan Ekonomi dengan Fokus pada Kemandirian Lokal Berbasis Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian, Perikanan, Sektor Jasa dan Industri Untuk Membuka Lapangan Pekerjaan dan Mengurangi Kemiskinan.
	Sidoarjo Maju	Misi 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha
	Sidoarjo Berkarakter	Misi 4 : Membangun Sumber Daya Manusia Unggul dan Berkarakter Melalui Peningkatan Akses Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan serta Kebutuhan Dasar Lainnya. Misi 5 : Mewujudkan Masyarakat Religius yang Berpegang Teguh pada Nilai-Nilai Keagamaan serta Mampu Menjaga Kerukunan Sosial Antar Warga.
	Pembangunan Berkelanjutan	Misi 3 : Membangun Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang Modern dan Berkeadilan dengan Memperhatikan Keberlanjutan Lingkungan.

Sumber Data : RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026

Pemetaan sebagaimana dilakukan pada tabel di atas, hanya pendekatan logis untuk memastikan keterkaitan antara Visi dengan Misi. Namun secara substansial keterkaitan tersebut meliputi dimensi yang sangat luas, dimana sebuah misi dapat mendukung ke banyak pokok visi, dan antara pokok visi satu dengan pokok visi lain masih memiliki hierarki tertentu dimana tujuan akhirnya adalah kesejahteraan masyarakat Sidoarjo. Merujuk pada hasil pemetaan Misi berdasarkan pokok-pokok Visi di atas, maka dihasilkan lima misi Pembangunan Kabupaten Sidoarjo selama tahun 2021-2026 sebagai berikut :

Misi 1: *Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha.*

Penguatan tata kelola dan pelayanan publik yang bersih, transparan dan tangkas merupakan syarat wajib bagi percepatan dan efektivitas pembangunan daerah. Sedangkan pelayanan publik yang berkualitas, inovatif dan merata serta mendukung kemudahan berusaha merupakan komitmen kepala daerah menyadari potensi dan letak geografis Kabupaten Sidoarjo ke depan yang harus semakin diperhitungkan. Tata Kelola dan Pelayanan publik merupakan faktor penting yang merupakan pilar penting good governance. Selanjutnya diyakini bahwa pemerintahan yang bersih dan sehat akan dapat melahirkan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat .

Misi 2: *Membangkitkan Pertumbuhan Ekonomi dengan Fokus pada Kemandirian Lokal Berbasis Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian, Perikanan, Sektor Jasa dan Industri Untuk Membuka Lapangan Pekerjaan dan Mengurangi Kemiskinan.*

Misi ini akan fokus pada penguatan ekonomi yang bertumpu pada sektor utama, yaitu perdagangan, industri pengolahan dan jasa serta secara simultan melakukan pengembangan secara optimal terhadap sector potensial lainnya. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan antar kelompok pendapatan serta pengentasan kemiskinan. Selain itu, misi ini juga akan diarahkan untuk

pengelolaan ketenagakerjaan melalui pengembangan sektor ekonomi rakyat, yaitu koperasi, usaha mikro, pertanian dalam arti luasi khususnya sub sector perikanan yang menjadi keunggulan Kabupaten Sidoarjo. Intervensi kebijakan simultan ini diharapkan dapat memicu percepatan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat dan berdampak pada pendapatan asli daerah yang mendorong kemandirian fiskal daerah.

Misi 3: *Membangun Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang Modern dan Berkeadilan dengan Memperhatikan Keberlanjutan Lingkungan.*

Misi ini menekankan pada pentingnya pemenuhan kualitas infrastruktur dasar yang merata serta kualitas lingkungan hidup yang baik bagi masyarakat. Percepatan pembangunan segala sektor harus didukung oleh ketersediaan infrastruktur yang memadai dan merata. Kabupaten Sidoarjo membutuhkan daya dukung infrastruktur pendorong ekonomi dan social yang terintegrasi dan terpadu menjamin keseimbangan pembangunan di wilayah perkotaan dan perdesaan. Peluang dan tantangan Kabupaten Sidoarjo yang masuk dalam Pengembangan Kawasan Strategis Nasional (PKSN) Metropolis Gerbangkertosusila dan titik penghubung bagi PKSN lainnya menjadi catatan penting. Namun demikian, guna menghindari dampak negatif pembangunan bagi kelestarian lingkungan, maka prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi kata kunci bagi Kabupaten Sidoarjo

Misi 4: *Membangun Sumber Daya Manusia Unggul dan Berkarakter Melalui Peningkatan Akses Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan serta Kebutuhan Dasar Lainnya.*

Pembangunan berpusat pada manusia (*people centered development*) ini memberikan kesadaran pada seluruh dunia bahwa investasi pembangunan pada penguatan kualitas sumber daya manusia (*human resources*) akan memberikan dampak yang besar pada percepatan pembangunan jangka panjang. Terkait dengan hal tersebut, maka misi ini akan fokus pada upaya penguatan Sumber Daya Manusia, khususnya bidang pendidikan dan kesehatan serta kebutuhan dasar

lainnya. Membangun sumber daya unggul tentu meliputi berbagai aspek, antara lain terbentuknya karakter masyarakat yang luhur berbasis nilai-nilai budaya dan agama. Dinamika pembangunan dunia telah membuktikan bahwa penempatan nilai-nilai karakter budaya sebagai prinsip pembangunan akan mendorong pembangunan kearah yang lebih jelas.

Misi 5: *Mewujudkan Masyarakat Religius yang Berpegang Teguh pada Nilai-Nilai Keagamaan serta Mampu Menjaga Kerukunan Sosial Antar Warga.*

Nilai (value) yang mendasari semangat juang dan pola hidup masyarakat memiliki peran penting dalam proses pembangunan. Nilai-nilai keagamaan yang berakulturasi dengan nilai-nilai tradisi luhur sebuah masyarakat akan membentuk karakter sosial yang khas. Karakteristik masyarakat Kabupaten Sidoarjo yang tegas, lugas, namun tetap ramah dan hangat menjadi modal teramat besar bagi pembangunan Kabupaten Sidoarjo ke depan. Berpijak pada value tersebut, diyakini akan melahirkan tatanan masyarakat yang tertib tentram, toleran dan memiliki penghargaan terhadap kesetaraan gender.

3. Tujuan dan Sasaran

Untuk mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan, maka diperlukan cara untuk mencapainya melalui Tujuan dan Sasaran. Tujuan adalah kinerja jangka menengah / lima tahunan, sedangkan Sasaran adalah kinerja tahunan. Adapun Tujuan dan Sasaran beserta indikator kerjanya dalam RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel I.3

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Misi-1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha	Indeks Reformasi Birokrasi	Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Berbasis Digital.	Nilai SAKIP Kabupaten
				Opini atas Audit BPK
				Survey Eksternal Persepsi Korupsi
				Status Kinerja LPPD
				Nilai Indeks SPBE
				Indeks Inovasi Daerah
				Tingkat Maturitas SPIP
			Terselenggaranya Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Mendukung Kemudahan Berusaha.	Indeks Pelayanan Publik (IPP)
Misi-2 : Membangkitkan Pertumbuhan Ekonomi dengan Fokus pada Kemandirian Lokal Berbasis Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian, Perikanan, Sektor Jasa dan Industri Untuk Membuka Lapangan Pekerjaan dan Mengurangi Kemiskinan	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Inklusif melalui Percepatan Industri dan Perdagangan serta mendorong potensi lokal melalui pengembangan usaha mikro, koperasi, pertanian dan perikanan.	Pertumbuhan Ekonomi	Berkembangnya Perdagangan, Industri, Investasi, Pertanian dan Perikanan.	Persentase Kontribusi PDRB sektor perdagangan
				Persentase kontribusi PDRB sektor industri
				Laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian dalam arti luas
				Persentase pertumbuhan nilai investasi

		Indeks GINI	Berkembangnya Koperasi, Usaha Mikro dan Kemandirian Desa	Persentase usaha mikro mandiri
				Persentase koperasi berkualitas
				Persentase Desa Mandiri
	Terciptanya Lapangan Kerja yang berdampak pada Penanggulangan Kemiskinan	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Terserapnya Tenaga Kerja untuk Mengatasi Pengangguran	Persentase tenaga kerja yang terserap di sembilan sektor
		Persentase penduduk miskin	Menurunnya Penduduk miskin	Persentase penduduk diatas Garis Kemiskinan
Misi-3 : Membangun Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang Modern dan Berkeadilan dengan Memperhatikan Keberlanjutan Lingkungan	Meningkatnya Infrastruktur Pendukung Kegiatan Ekonomi Sosial yang Berkeadilan dan Memperhatikan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan	Indeks Infrastruktur	Tersedianya Infrastruktur yang Berkualitas dan Merata	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum
				Indeks Infrastruktur Pendidikan
				Indeks Infrastruktur Kesehatan
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Penanganan Terhadap Bencana.	Indeks Kualitas Air
				Indeks Kualitas Udara
				Indeks Kualitas Tutuan Lahan
		Indeks Resiko Bencana		
Misi-4 : Membangun Sumber Daya Manusia Unggul dan Berkarakter Melalui Peningkatan Akses Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan serta Kebutuhan Dasar Lainnya	Terwujudnya Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas dan Merata serta Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Lainnya	Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Harapan Lama Sekolah (HLS)
				Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)
			Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)
			Meningkatnya Kesetaraan Gender dalam Masyarakat	Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Misi-5 : Mewujudkan Masyarakat Religius yang Berpegang Teguh pada Nilai-Nilai Keagamaan serta Mampu Menjaga Kerukunan Sosial Antar Warga	Menguatnya Karakter Masyarakat melalui Internalisasi Nilai-Nilai Keagamaan dan kebudayaan untuk Menciptakan Ketertiban, Kerukunan dan Ketentraman dalam masyarakat	Indeks Kesalahan Sosial	Berkembangnya nilai-nilai budaya dan agama serta toleransi dalam Masyarakat	Indeks Toleransi
			Terciptanya kondisi masyarakat yang aman, nyaman dan tentram	Indeks Pelestarian Budaya Indeks Rasa Aman

Sumber Data : RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026

4. Program Prioritas

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam pembangunan jangka menengah, serta memperhatikan Strategi dan Arah Kebijakan pembangunan, maka disusun program-program pembangunan yang akan dilaksanakan dalam lima tahun ke depan, berdasarkan janji politik Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo periode tahun 2021-2026.

Sebagai upaya untuk mewujudkan masyarakat Sidoarjo yang Maju, Aman dan Sejahtera, maka disusun 17 (tujuh belas) Program Strategis yang merupakan komitmen Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo Tahun 2021-2026, sebagai berikut :

1. Program Prioritas 1 : 100.000 Lapangan Kerja Baru
2. Program Prioritas 2 : BPJS Kesehatan Gratis Seluruh Warga
3. Program Prioritas 3 : Gratis Makanan Tiap Hari Warga Miskin
4. Program Prioritas 4 : 10.000 Beasiswa Kuliah
5. Program Prioritas 5 : Insentif Plus Guru Ngaji dan Guru Agama
6. Program Prioritas 6 : Rp. 5 Juta – 50 Juta Modal Usaha Mikro Perempuan
7. Program Prioritas 7 : Rp. 6 Juta Operasional Bagi RT
8. Program Prioritas 8 : 20.000 UMKM Naik Kelas
9. Program Prioritas 9 : Penataan Kota dan Transportasi Terpadu Urai Kemacetan

10. Program Prioritas 10 : Tingkatkan Kesejahteraan Tenaga Kesehatan dan Kader Posyandu
11. Program Prioritas 11 : Tingkatkan Kesejahteraan GTT, Guru Swasta, dan Tenaga Honorer
12. Program Prioritas 12 : Youth Center, Bangun Pusa Kreativitas Anak Muda
13. Program Prioritas 13 : 2.000 Warung Rakyat Direnovasi
14. Program Prioritas 14 : Tingkatkan ADD Untuk Desa Sejahtera
15. Program Prioritas 15 : 24 Jam Pengaduan Rakyat Respon Cepat
16. Program Prioritas 16 : Reformasi Perijinan Untuk Bisnis Yang Kondusif
17. Program Prioritas 17 : Perluasan RTH, Revitalisasi Sungai, Revolusi Manajemen Sampah

C. Gambaran Umum Daerah

1. Kondisi Geografis Daerah

Kabupaten Sidoarjo, secara astronomis terletak di antara 7,3° – 7,5° LS (Lintang Selatan) dan antara 112,5° – 112,9° BT (Bujur Timur). Sementara secara geografis, kabupaten ini berbatasan dengan Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik di sebelah utara, Kabupaten Pasuruan di sebelah selatan, Selat Madura di sebelah timur, dan Kabupaten Mojokerto di sebelah barat.

Kabupaten yang memiliki luas wilayah sebesar 714.243 km² ini terbagi menjadi 18 kecamatan. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Jabon dengan luas wilayah sebesar 11,34 persen terhadap luas wilayah kabupaten secara keseluruhan. Diikuti oleh Kecamatan Sedati yang memiliki luas sebesar 11,12 persen terhadap luas wilayah kabupaten.

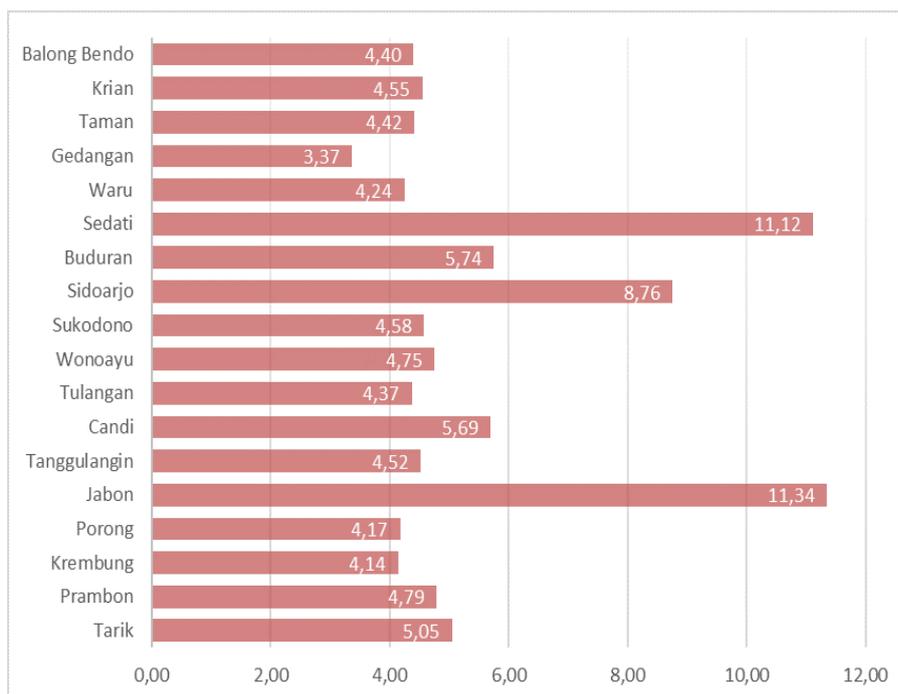
Tabel I.4**Luas Daerah Menurut Kecamatan Tahun 2021**

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km2)	Persentase
1	Tarik	36,06	5,05
2	Prambon	34,23	4,79
3	Krembung	29,55	4,14
4	Porong	29,82	4,18
5	Jabon	81,00	11,34
6	Tanggulangin	32,29	4,52
7	Candi	40,67	5,69
8	Tulangan	31,21	4,37
9	Wonoayu	33,92	4,75
10	Sukodono	32,68	4,58
11	Sidoarjo	62,56	8,76
12	Buduran	41,03	5,74
13	Sedati	79,43	11,12
14	Waru	30,32	4,25
15	Gedangan	24,06	3,37
16	Taman	31,54	4,42
17	Krian	32,50	4,55
18	Balongbendo	31,40	4,40
Jumlah		714,24	100,00

Sumber : Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka 2022

Grafik I.1

Luas Daerah Menurut Kecamatan Tahun 2021



Sumber : Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka 2022

Secara administratif Kabupaten Sidoarjo terbagi atas 18 Kecamatan, 322 Desa dan 31 Kelurahan. Sementara itu desa-desa di Kabupaten Sidoarjo terbagi menjadi desa pedesaan (*rural area*) dan desa perkotaan (*urban area*).

Tabel I.5

Desa dan Kelurahan per Kecamatan

No	Kecamatan	Desa	Kelurahan
1.	Sidoarjo	10	14
2.	Buduran	15	-
3.	Candi	24	-
4.	Porong	13	6
5.	Krembung	19	-
6.	Tulangan	22	-
7.	Tanggulangin	19	-

8.	Jabon	15	-
9.	Krian	19	3
10.	Balongbendo	20	-
11.	Wonoayu	23	-
12.	Tarik	20	-
13.	Prambon	20	-
14.	Taman	16	8
15.	Waru	17	-
16.	Gedangan	15	-
17.	Sedati	16	-
18.	Sukodono	19	-
	JUMLAH	322	31

Sumber Data : Selayang Pandang Sidoarjo

Grafik I.2

Peta Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo



Sumber Data : Selayang Pandang Sidoarjo

Kabupaten Sidoarjo juga dikenal dengan sebutan kota “Delta”, dikarenakan wilayahnya yang berada di antara dua sungai besar pecahan Kali Brantas, yakni Kali Surabaya di sebelah utara dan Kali Porong di sebelah selatan.

Wilayah Kabupaten Sidoarjo berada pada ketinggian 0-25 mdpl dan terbagi atas tiga kelas, yaitu :

- 0-3 meter, merupakan daerah pantai dan pertambakan yang berair asin/payau, berada di sebelah timur.
- 3-10 meter, merupakan daerah bagian tengah yang berair tawar.
- 10-25 meter, terletak di daerah bagian barat.

Sepanjang tahun 2021, Stasiun Meteorologi Kelas I Juanda Sidoarjo mencatat suhu tertinggi di Kabupaten Sidoarjo mencapai 35,6oC, terjadi di bulan Oktober. Sementara suhu terendah terjadi di bulan Juli, sebesar 19,1oC dengan kelembaban rata-rata sebesar 74,9 persen.

Sementara itu, bersumber dari lokasi penakar hujan yang terdapat di 30 titik berbeda yang tersebar di semua kecamatan di Sidoarjo, diketahui bahwa selama Januari- Desember 2021 terdapat 174 hari hujan.

Curah hujan dan jumlah hari hujan relatif tinggi selama Januari-Mei, tercatat sebanyak 113 hari hujan dengan curah hujan tertinggi sebesar 527,5 mm di bulan Februari. Curah hujan turun secara signifikan mulai bulan Juni sampai dengan Oktober, tercatat hanya 19 hari hujan dalam 5 bulan.

Tabel I.6
Suhu dan Kelembapan per Bulan di Tahun 2021

Bulan	Suhu (°C)			Kelembapan (%)		
	Minimum	Rata-Rata	Maksimum	Minimum	Rata-Rata	Maksimum
Januari	24,3	27,0	31,5	58,8	84,8	100,0
Februari	24,2	27,3	31,6	55,9	83,2	100,0
Maret	24,4	27,9	32,2	51,2	82,6	100,0
April	24,5	28,5	32,7	44,3	77,5	96,7
Mei	25,8	29,0	32,4	52,1	76,6	93,5
Juni	25,2	28,2	32,1	54,3	76,5	99,1

Juli	23,5	28,8	31,9	44,0	75,4	95,0
Agustus	24,2	28,2	31,9	44,0	75,4	95,0
September	24,7	28,5	33,0	41,5	73,3	96,7
Oktober	25,2	29,5	33,9	40,5	70,0	94,2
Nopember	24,9	27,9	32,3	45,1	81,7	98,3
Desember	25,0	28,2	32,7	48,2	81,3	98,3

Sumber Data : Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka 2022

Tabel I.7

Kecepatan Angin dan Tekanan Udara per Bulan di Tahun 2021

Bulan	Kecepatan Angin (m/det)			Tekanan Udara (mb)		
	Minimum	Rata-Rata	Maksimum	Minimum	Rata-Rata	Maksimum
Januari	0,0	4,4	13,9	1.003,6	1.008,6	1.011,5
Februari	0,0	5,1	17,0	1.002,6	1.009,4	1.012,5
Maret	0,0	4,4	17,0	1.002,4	1.009,7	1.013,1
April	0,0	3,4	14,4	1.002,8	1.010,6	1.013,6
Mei	0,0	3,4	7,7	1.001,3	1.010,2	1.012,8
Juni	0,0	3,5	11,3	1.005,1	1.011,2	1.013,5
Juli	0,0	3,6	10,3	1.006,5	1.011,3	1.013,9
Agustus	0,0	3,9	9,8	1.006,5	1.011,8	1.014,4
September	0,0	4,0	13,4	1.006,1	1.011,3	1.014,8
Oktober	0,0	3,9	22,6	1.004,8	1.010,8	1.014,5
Nopember	0,0	3,4	12,9	1.003,4	1.009,1	1.012,6
Desember	0,0	3,9	10,3	1.004,4	1.009,8	1.013,1

Sumber Data : Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka 2022

Tabel I.8
Jumlah Curah Hujan, Jumlah Hari Hujan, dan Penyinaran Matahari
per Bulan di Tahun 2021

Bulan	Jumlah Curah Hujan (mm)	Jumlah Hari Hujan (day)	Penyinaran Matahari (%)
Januari	572,0	26	33,6
Februari	417,0	23	54,1
Maret	258,8	17	65,6
April	102,6	9	80,2
Mei	10,2	3	89,6
Juni	211,2	10	78,0
Juli	17,1	3	88,6
Agustus	1,5	1	96,2
September	47,0	3	79,3
Oktober	15,0	2	75,4
Nopember	365,6	18	32,8
Desember	436,4	21	33,3

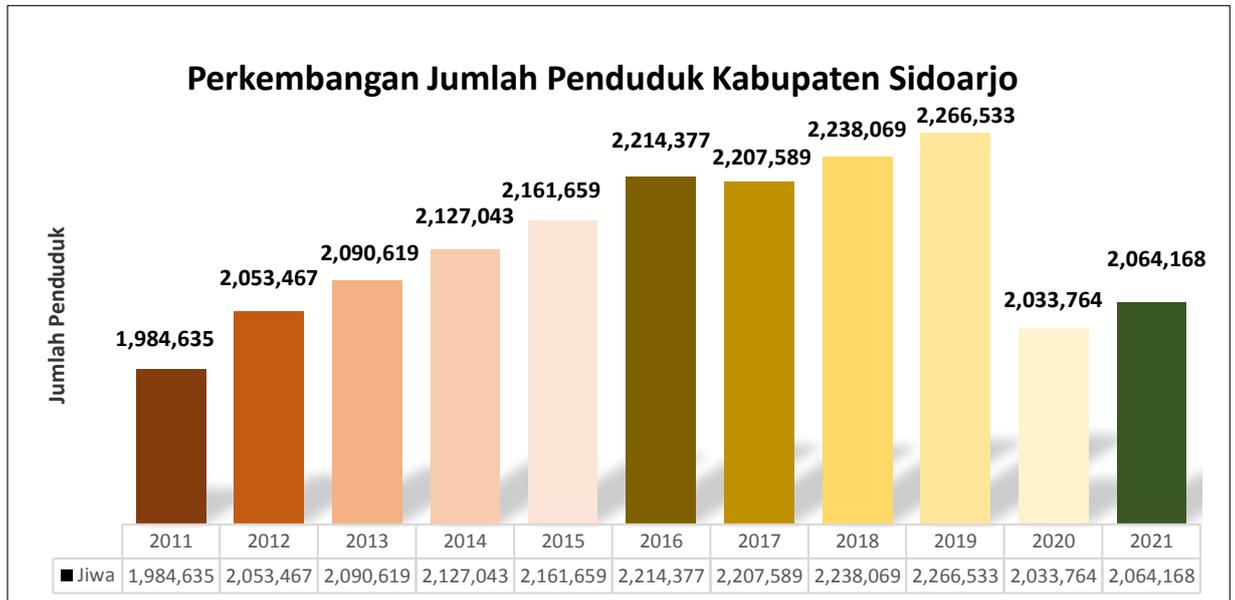
Sumber Data : Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka 2022

2. Gambaran Umum Demografis

Jumlah penduduk menggambarkan potensi dari suatu daerah, perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Sidoarjo selalu mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2019. Sedangkan mulai tahun 2020 jumlah penduduk mengalami penurunan karena mengalami koreksi melalui pembersihan database Sistem Administrasi Kependudukan (SIK) oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, sebagaimana Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Setelah dilakukan konsolidasi dan penyandingan database, sehingga jumlah penduduk di Kabupaten Sidoarjo mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 telah terkoreksi. Berdasarkan laporan

perkembangan penduduk di tahun 2021, penduduk Kabupaten Sidoarjo berjumlah 2.064.168 jiwa. Perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Sidoarjo dapat digambarkan sebagaimana grafik berikut :

Grafik I.3



Sumber data : Data Kependudukan pada Aplikasi SIAK

Jumlah penduduk per Kecamatan, beserta laju pertumbuhan dan kepadatan penduduk dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel I.9

Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan, dan Kepadatan Penduduk Per Kecamatan Tahun 2021

Kecamatan	Penduduk	Laju Pertumbuhan (%)	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per Km ²
Tarik	69.970	1,13	3,39%	1 940,38
Prambon	80.959	1,26	3,92%	2 365,15
Krebung	70.956	1,54	3,44%	2 401,22
Porong	74.290	1,15	3,60%	2 491,28
Jabon	57.183	1,62	2,77%	705,96
Tanggulangin	91.119	1,47	4,41%	2 821,90
Candi	156.451	1,97	7,58%	3 846,84
Tulangan	104.407	2,02	5,06%	3 345,31

Wonoayu	87.278	1,98	4,23%	2 573,05
Sukodono	124.734	2,36	6,04%	3 816,83
Sidoarjo	204.441	1,65	9,90%	3 267,92
Buduran	100.296	1,60	4,86%	2 444,46
Sedati	98.246	1,67	4,76%	1 236,89
Waru	201.920	0,58	9,78%	6 659,63
Gedangan	121.920	1,25	5,89%	5 049,92
Taman	209.510	0,82	10,15%	6 642,68
Krian	134.051	2,38	6,49%	4 124,65
Balongbendo	76.856	1,07	3,72%	2 447,64
JUMLAH	2.064.168	1,50	100,00%	2.890,02

Sumber data : Data Kependudukan pada Aplikasi SIAK

Dari tabel tersebut terlihat bahwa berdasarkan jumlah penduduk per kecamatan, kecamatan Taman memiliki jumlah penduduk terbanyak yaitu 209.510 jiwa atau 10,15%, sedangkan kecamatan Jabon memiliki jumlah penduduk terkecil yaitu 57.183 jiwa atau 2,77%.

Jumlah penduduk per Kecamatan menurut jenis kelamin berdasarkan data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) terlihat sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel I.10

Penduduk Per Kecamatan Menurut Jenis Kelamin Tahun 2021

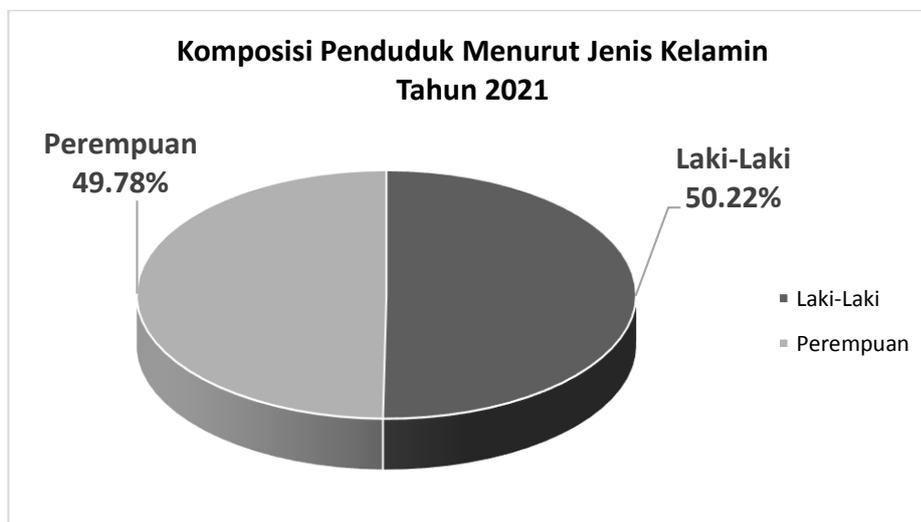
NO	KECAMATAN	LAKI LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	TARIK	35,267	34,703	69,970
2	PRAMBON	40,836	40,123	80,959
3	KREMBUNG	35,508	35,448	70,956
4	PORONG	37,544	36,746	74,290
5	JABON	28,743	28,440	57,183
6	TANGGULANGIN	45,747	45,372	91,119
7	CANDI	78,328	78,123	156,451
8	SIDOARJO	101,594	102,847	204,441

9	TULANGAN	52,437	51,970	104,407
10	WONOAYU	44,058	43,220	87,278
11	KRIAN	67,914	66,137	134,051
12	BALONGBENDO	38,827	38,029	76,856
13	TAMAN	105,446	104,064	209,510
14	SUKODONO	63,194	61,540	124,734
15	BUDURAN	50,404	49,892	100,296
16	GEDANGAN	60,961	60,540	121,501
17	SEDATI	49,487	48,759	98,246
18	WARU	100,373	101,547	201,920
	TOTAL	1.036.668	1.027.500	2.064.168

Sumber data : Data Kependudukan pada Aplikasi SIAK

Sedangkan apabila dilihat dari komposisi penduduk menurut jenis kelamin, terbanyak adalah penduduk laki-laki yaitu 1.036.668 jiwa atau 50,22%, sedangkan penduduk perempuan yaitu 1.027.500 jiwa atau 49,78%. Hal tersebut dapat dijelaskan melalui tabel dan grafik berikut :

Grafik I.4



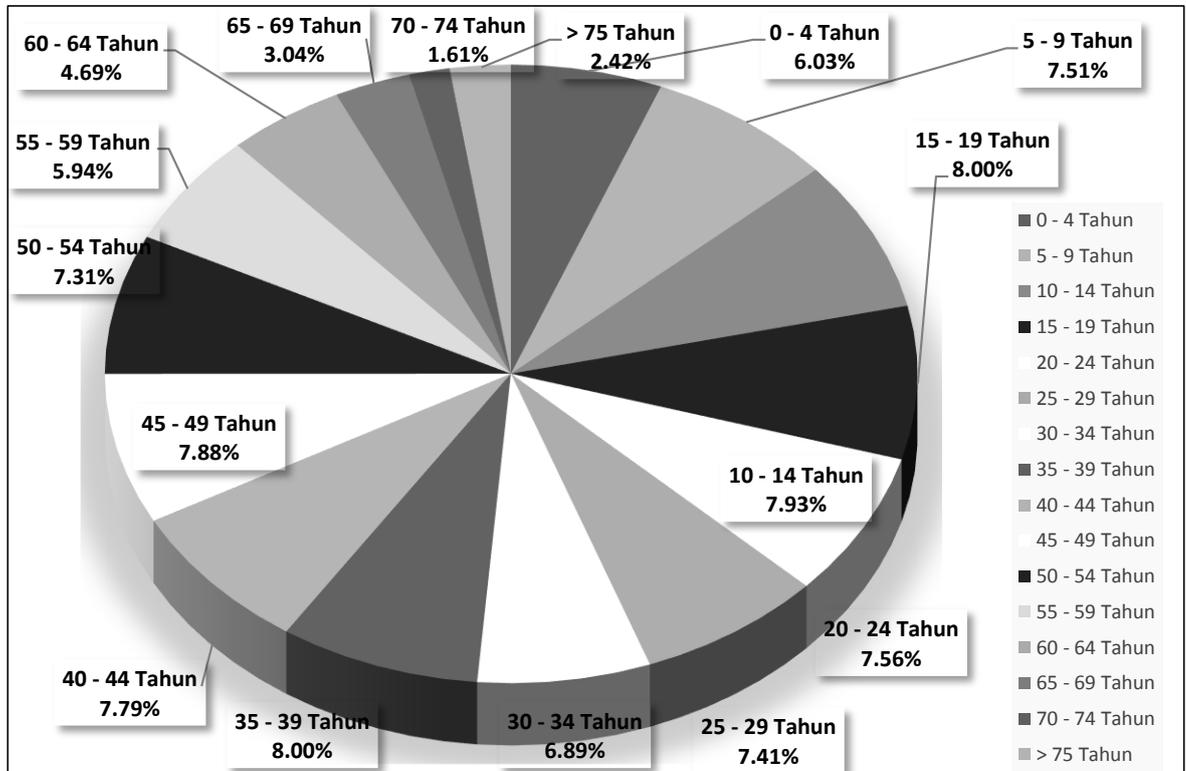
Sumber data : Data Kependudukan pada Aplikasi SIAK

Sedangkan berdasarkan struktur usia penduduk Kabupaten Sidoarjo sebagian besar penduduk berada dalam kelompok umur

muda yaitu 15 tahun samai dengan 19 tahun. Hal ini terlihat pada grafik berikut.

Grafik I.5

Komposisi Penduduk Menurut Usia Tahun 2021



Sumber data : Data Kependudukan pada Aplikasi SIAK

Tabel I.11

Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2021

No	Struktur Usia	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	0-4	63,224	58,613	121,837
2.	5-9	77,580	72,505	150,085
3.	10-14	82,985	77,906	160,891
4.	15-19	85,359	79,564	164,923
5.	20-24	80,290	76,804	157,094
6.	25-29	78,460	75,930	154,390
7.	30-34	70,600	68,708	139,308
8.	35-39	80,048	79,727	159,775

9.	40-44	78,369	82,152	160,521
10.	45-49	77,120	82,559	159,679
11.	50-54	75,766	78,728	154,494
12.	55-59	60,701	65,098	125,799
13.	60-64	48,799	48,955	97,754
14.	65-69	35,468	32,199	67,667
15.	70-74	17,663	18,785	36,448
16.	> 75	24,236	29,267	53,503
	JUMLAH	1.036.668	1.027.500	2.064.168

Sumber data : Data Kependudukan pada Aplikasi SIAK

3. Kondisi Perekonomian

Nilai PDRB Kabupaten Sidoarjo atas dasar harga berlaku pada tahun 2021 mencapai 197,24 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami penurunan sebesar 6,96 triliun rupiah dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 204,20 triliun rupiah. Turunnya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh penurunan produksi di seluruh lapangan usaha akibat adanya pandemi covid 19.

Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami penurunan, dari 140,49 triliun rupiah pada tahun 2020 menjadi 135,31 triliun rupiah pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan selama tahun 2021 terjadi perlambatan terhadap perekonomian Sidoarjo sebesar 3,69 persen. Penurunan PDRB ini murni disebabkan oleh menurunnya produksi di seluruh lapangan usaha.

Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi tiap lapangan usaha.

Selama lima tahun terakhir (2017-2021), struktur perekonomian Kabupaten Sidoarjo didominasi oleh 3 (tiga) kategori lapangan usaha,

sebagai berikut: industri pengolahan; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda; dan kategori konstruksi. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Sidoarjo.

Pada tahun 2021, peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Sidoarjo dihasilkan oleh lapangan usaha industri pengolahan, yaitu mencapai 51,17 persen, meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda sebesar 16,02, turun 0,27 persen dari tahun 2020, disusul oleh lapangan usaha konstruksi sebesar 8,68 persen.

Kondisi ekonomi daerah diukur berdasarkan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan dan harga berlaku. PDRB diukur berdasarkan perhitungan 17 (tujuh belas) sektor usaha yang dominan di masyarakat. Rincian PDRB per sektor usaha release terakhir oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sidoarjo, yaitu pada tahun 2021 dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel I.12

PDRB Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 (dalam Miliar Rupiah)

NO	SEKTOR	Harga Berlaku	Harga Konstan
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4.478,98	2.626,37
2	Pertambangan dan Penggalian	134,92	101,68
3	Industri Pengolahan	109.461,90	76.097,88
4	Pengadaan Listrik dan Gas	1.784,97	1.078,33
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	139,82	117,09
6	Konstruksi	16.070,90	11.386,68
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	35.456,16	22.721,41
8	Transportasi dan Pergudangan	15.037,48	6.672,86
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7.4169,71	4.922,01
10	Informasi dan Komunikasi	7.997,72	7.070,29
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2.550,76	1.614,91
12	Real Estate	1.994,61	1.406,46

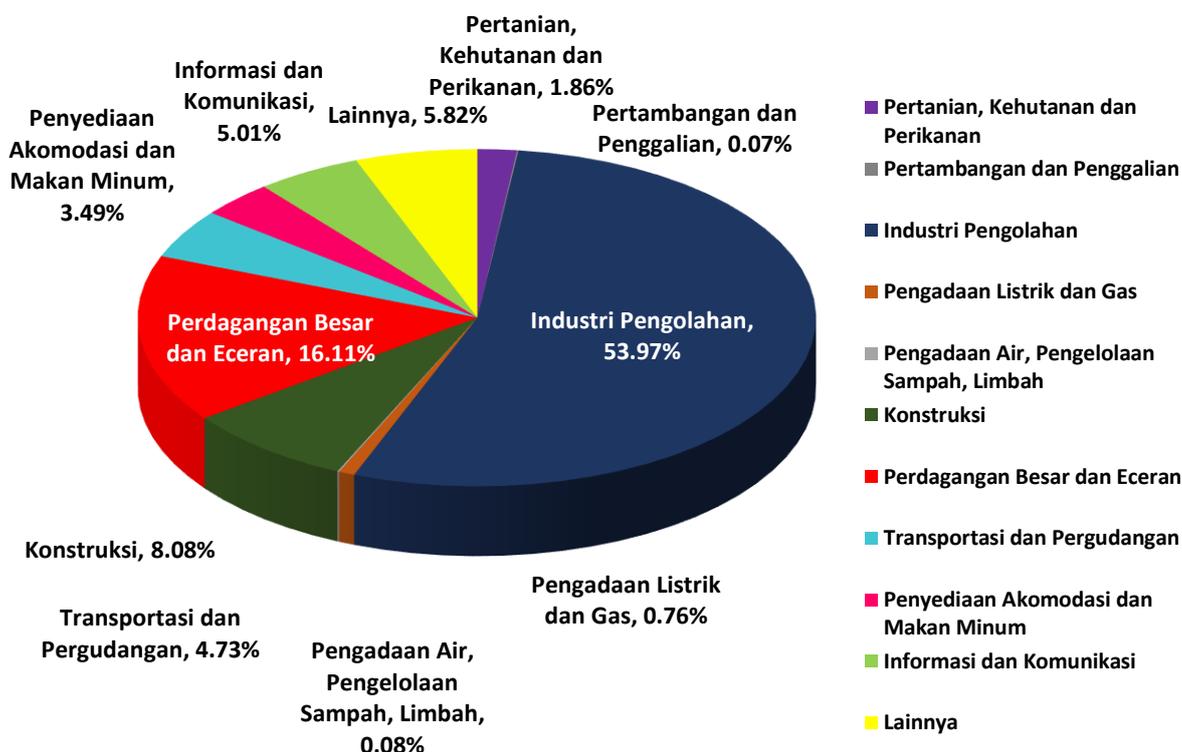
13	Jasa Perusahaan	327,12	211,04
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3.881,62	2.298,30
15	Jasa Pendidikan	2.479,17	1.693,41
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	729,41	519,60
17	Jasa Lainnya	648,64	462,02
	TOTAL	210.643,89	141.000,36

Sumber data : Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka 2022

Berdasarkan Tabel diatas dapat diketahui bahwa PDRB Kabupaten Sidoarjo tahun 2021 berdasarkan ADHK dan ADHB terdapat sektor yang menonjol memberikan sumbangan paling besar terhadap PDRB yaitu sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan. Berikut *share* PDRB berdasarkan ADHK Kabupaten Sidoarjo per sektor, sebagaimana grafik :

Grafik I.6

Share PDRB Berdasarkan ADHK



Sumber data : Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka 2022

D. Sumber Daya PNS

Salah satu instrumen penunjang utama pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat adalah pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai. Jumlah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berdasarkan data Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) per tanggal 31 Desember 2021 sebanyak 10.262 orang yang terdiri dari, sebagai berikut :

No	Unit Kerja	Jabatan Struktural	Fungsional Umum / Pelaksana	Fungsional Tertentu	Jumlah Pegawai
1	Sekretariat Daerah	18	120	26	164
2	Badan Kepegawaian Daerah	7	42	24	73
3	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	4	20	4	28
4	Badan Pelayanan Pajak Daerah	6	55	11	72
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6	57	6	69
6	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	5	49	9	63
7	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	6	28	18	52
8	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	4	45	7	56
9	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	5	30	16	51
10	Dinas Kesehatan	8	245	1.154	1.407
11	Dinas Komunikasi Dan Informatika	5	39	15	59
12	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro	6	27	8	41
13	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan	6	259	20	285
14	Dinas Pangan Dan Pertanian	9	55	67	131
15	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sumber Daya Air	7	95	15	117
16	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5	21	12	38
17	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	13	566	5.022	5.602
18	Dinas Perhubungan	14	53	18	85

19	Dinas Perikanan	6	29	6	41
20	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	5	140	19	164
21	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	5	14	15	34
22	Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya Dan Tata Ruang	8	32	13	53
23	Dinas Sosial	6	18	8	32
24	Dinas Tenaga Kerja	6	15	13	34
25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	7	16	12	35
26	Inspektorat	7	20	40	67
27	Kecamatan Balongbendo	7	18	1	26
28	Kecamatan Buduran	6	15	1	22
29	Kecamatan Candi	5	21	1	27
30	Kecamatan Gedangan	6	13	1	20
31	Kecamatan Jabon	5	11	1	17
32	Kecamatan Krembung	8	17	1	26
33	Kecamatan Krian	13	23	0	36
34	Kecamatan Porong	14	26	1	41
35	Kecamatan Prambon	4	22	2	28
36	Kecamatan Sedati	8	19	1	28
37	Kecamatan Sidoarjo	38	54	1	93
38	Kecamatan Sukodono	7	15	1	23
39	Kecamatan Taman	18	32	1	51
40	Kecamatan Tanggulangin	7	19	1	27
41	Kecamatan Tarik	8	21	1	30
42	Kecamatan Tulangan	7	19	2	28
43	Kecamatan Waru	8	19	1	28
44	Kecamatan Wonoayu	6	18	1	25
45	Rumah Sakit Umum Daerah	25	145	481	651
46	Satuan Polisi Pamong Praja	7	28	61	96
47	Sekretariat DPRD	6	39	11	56
48	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana	7	13	10	30
	JUMLAH	404	2.698	7.160	10.262

Sumber Data : Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG)

E. Pengelolaan Pendapatan Daerah

Otonomi daerah yang diamanatkan pada UU 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, menuntut semua daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk mengelola sumber keuangannya sendiri. Kabupaten Sidoarjo memiliki banyak potensi yang dapat dipergunakan untuk memaksimalkan pengelolaan keuangan, terutama dari segi optimalisasi pendapatan. Pagu pendapatan dapat didorong melalui penggalan potensi PAD, dan perbaikan kinerja pemerintah untuk merencanakan besaran pagu DAU dan DAK yang merupakan dana transfer dari pemerintah pusat. Secara umum struktur pendapatan daerah setelah otonomi, sumber penerimaan pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten berasal dari (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pos pendapatan pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, (2) Dana Perimbangan, (3) Dana Alokasi Umum (DAU), (4) Dana Alokasi Khusus (DAK), dan (5) Bagi Hasil Pajak dan Batuan Keuangan dari Propinsi.

Secara umum peningkatan pendapatan daerah dilakukan dengan pendekatan :

- 1) Intensifikasi pendapatan daerah dilakukan dengan upaya optimalisasi sumber-sumber pendapatan yang ada menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
- 2) Ekstensifikasi pendapatan daerah yaitu menggali sumber-sumber pendapatan dengan melihat kemungkinan-kemungkinan terhadap pemungutan akan sumber-sumber pendapatan daerah yang belum ada selama ini, atau dengan kata lain menggali sumber-sumber pendapatan baru.
- 3) Optimalisasi penarikan pendapatan pajak dan retribusi dilakukan melalui pemanfaatan information and communication teknologi (ICT).
- 4) Proyeksi atas perhitungan pendapatan daerah harus berdasarkan pada pemetaan potensi dan kajian akademik.

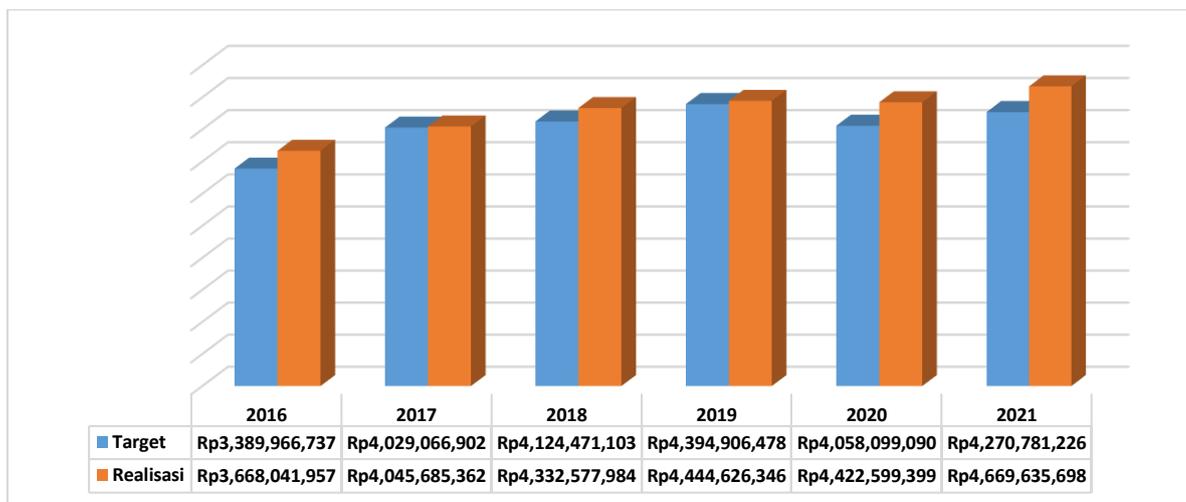
- 5) Penyelesaian pajak dan retribusi terutang dioptimalkan melalui penagihan secara terus menerus dan disertai kajian mengenai cleansing data.

Sebagai upaya untuk mencapai target pendapatan daerah yang lebih baik maka perlu ditetapkan kebijakan peningkatan pendapatan daerah. Kebijakan tersebut berfokus pada peningkatan dan optimalisasi PAD khususnya pada penerimaan pajak dan retribusi daerah tanpa harus menambah beban masyarakat. PAD sebagai sumber penerimaan daerah merupakan indikator kekuatan dan kemandirian pembiayaan pembangunan daerah sesuai misi Kabupaten Sidoarjo.

Target dan realisasi pendapatan daerah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tahun	Target Pendapatan	Realisasi Pendapatan	%
	(Rp.)	(Rp.)	
2016	Rp. 3.389.966.737.239,00	Rp. 3.668.041.957.746,70	108,20%
2017	Rp. 4.029.066.902.057,03	Rp. 4.045.685.362.112,53	100,41%
2018	Rp. 4.124.471.103.455,83	Rp. 4.332.577.984.768,01	105,05%
2019	Rp. 4.394.906.478.896,00	Rp. 4.444.626.346.624,69	101,13%
2020	Rp. 4.058.099.090.414,00	Rp. 4.422.599.399.218,15	108,98%
2021	Rp. 4.270.781.226.451,00	Rp. 4.669.635.698.473,41	109,34%

Sumber Data : Laporan Keuangan Kab. Sidoarjo, untuk Tahun 2016 s.d 2020 Audited, seangkan untuk Tahun 2021 Unaudited per tanggal 25 Februari 2022

Grafik I.7**Perkembangan Pendapatan Kabupaten Sidoarjo**

Sumber Data : Laporan Keuangan Kab. Sidoarjo, untuk Tahun 2016 s.d 2020 Audited, seangkan untuk Tahun 2021 Unaudited per tanggal 25 Februari 2022

Target dan realisasi pendapatan daerah tahun 2021 adalah sebagai berikut :

KODE	URAIAN	ANGGARAN / TARGET	REALISASI	%
		(Rp)	(Rp)	
1	PENDAPATAN			
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1,714,484,423,345.00	1,921,244,253,335.69	112.06
1.2.	DANA PERIMBANGAN	2,331,099,589,317.00	2,521,918,383,870.00	108.19
1.3.	LAIN -LAIN PENDAPATAN YANG SAH	225,197,213,789.00	226,473,061,267.72	100.57
	JUMLAH PENDAPATAN	4,270,781,226,451.00	4,669,635,698,473.41	109.34

Sumber Data : Laporan Keuangan Kab. Sidoarjo Unaudited per tanggal 25 Februari 2022

Realisasi seluruh pendapatan daerah pada tahun 2021 sebesar Rp.4.669.635.698.473,41 atau 109,34% dari target / anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp. 4.270.781.226.451,00.

Realisasi pendapatan daerah tahun 2021 secara umum tercapai, dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Pendapatan Asli Daerah

Realisasi pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2021 sebesar Rp.1.921.244.253.335,69 atau tercapai sebesar 112,06% dari seluruh target PAD sebesar Rp.1.714.484.423.345,00.

Rincian realisasi dan target PAD tahun 2021 adalah sebagai berikut :

PENDAPATAN ASLI DAERAH

KODE	URAIAN	ANGGARAN / TARGET	REALISASI	%
		(Rp)	(Rp)	
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH			
1.1.1.	Pajak Daerah	962,962,000,000.00	1,027,822,704,720.00	106.74
1.1.2.	Retribusi Daerah	71,797,328,070.00	65,341,926,569.00	91.01
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	31,057,199,907.00	31,133,395,762.50	100.25
1.1.4.	Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) Yang Sah	648,667,895,368.00	796,946,226,284.19	122.86
	JUMLAH	1,714,484,423,345.00	1,921,244,253,335.69	112.06

Sumber Data : Laporan Keuangan Kab. Sidoarjo Unaudited per tanggal 25 Februari 2022

b. Pajak Daerah

Pajak daerah tahun 2021 realisasinya tercapai sebesar Rp.1.027.822.704.720,00 atau 106,74% dari seluruh target penerimaan pajak daerah.

JENIS / OBYEK PAJAK	ANGGARAN	REALISASI	%
	(Rp)	(Rp)	
Pajak Daerah	962,962,000,000.00	1,027,822,704,720.00	106.74
Pajak Hotel	12,000,000,000.00	14,080,874,501.00	117.34
Pajak Restoran	56,742,000,000.00	63,518,290,481.00	111.94
Pajak Hiburan	1,056,000,000.00	1,201,039,009.00	113.73
Pajak Reklame	14,000,000,000.00	14,593,286,453.00	104.24
Pajak Penerangan Jalan	352,000,000,000.00	313,967,752,550.00	89.20
Pajak Parkir	11,781,000,000.00	11,788,834,175.00	100.07
Pajak Air Tanah	3,080,000,000.00	3,167,681,195.00	102.85
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	258,000,000,000.00	254,650,339,833.00	98.70

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	254,303,000,000.00	350,854,606,523.00	137.97
---	--------------------	--------------------	--------

Sumber Data : Laporan Keuangan Kab. Sidoarjo Unaudited per tanggal 25 Februari 2022

Pajak penerangan jalan tidak tercapai karena adanya pandemi covid yang berdampak pada sektor industri (industri, mall, bioskop, dan lain sebagainya), serta kebijakan pemerintah pusat terkait pembebasan / relaksasi pembayaran listrik.

PBBP2 tidak tercapai karena wajib pajak mengalami kesulitan keuangan akibat pandemi covid sehingga mengajukan pengurangan, dan partisipasi wajib pajak dengan ketetapan kecil belum maksimal karena terkendala menurunnya aktivitas ekonomi akibat pandemi covid.

c. Retribusi Daerah

Retribusi daerah tahun 2021 terealisasi sebesar Rp.65.341.926.569,00 atau tercapai 91,01% dari seluruh target retribusi daerah yang ditetapkan. Seluruh jenis retribusi realisasinya terinci sebagai berikut :

JENIS / OBYEK RETRIBUSI	ANGGARAN	REALISASI	%
	(Rp)	(Rp)	
Retribusi Daerah	71,797,328,070.00	65,341,926,569.00	91.01
Retribusi Jasa Umum	47,593,252,500.00	35,630,980,382.00	74.87
Retribusi Jasa Usaha	5,351,798,000.00	5,587,920,734.00	104.41
Retribusi Perizinan Tertentu	18,852,277,570.00	24,123,025,453.00	127.96

Sumber Data : Laporan Keuangan Kab. Sidoarjo Unaudited per tanggal 25 Februari 2022

d. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.

Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tahun 2021 ditargetkan sebesar Rp.31.133.395.762,50 dan terealisasi sebesar Rp.31.057.199.907,00 atau tercapai sebesar 100,25%.

JENIS / OBYEK	ANGGARAN	REALISASI	%
	(Rp)	(Rp)	
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	31,057,199,907.00	31,133,395,762.50	100.25
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas	23,847,730,993.00	23,847,730,993.50	100.00

Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) DELTA ARTHA & BANK JATIM			
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) PDAU	375,834,464.00	375,834,464.00	100.00
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum) PDAM DELTA TIRTA	6,833,634,450.00	6,909,830,305.00	101.12
JUMLAH	31,057,199,907.00	31,133,395,762.50	100.25

Sumber Data : Laporan Keuangan Kab. Sidoarjo Unaudited per tanggal 25 Februari 2022

e. Penerimaan Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah

Penerimaan lain-lain PAD tahun 2021 sebesar Rp.796.946.226.284,19 atau tercapai 122,86%, dari target yang ditetapkan sebesar Rp.648.667.895.368,00.

JENIS / OBYEK	ANGGARAN	REALISASI	%
	(Rp)	(Rp)	
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	658,380,545.00	1,944,696,219.00	295.38
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	3,066,197,000.00	3,567,742,928.00	116.36
Jasa Giro	5,253,029,190.00	5,484,020,201.10	104.40
Pendapatan Bunga	30,106,849,314.00	18,644,513,626.16	61.93
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	58,431,000.00	141,718,400.00	242.54
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	682,506,208.00	1,667,648,229.45	244.34
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	338,613,579.00	1,791,919,877.39	529.19
Pendapatan Denda Pajak Daerah	2,093,827,331.00	2,561,423,056.00	122.33
Pendapatan Denda Retribusi Daerah	63,947,040.00	94,653,722.00	148.02
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	961,482,834.00	961,482,834.00	100.00
Pendapatan dari Pengembalian	170,828,876.00	247,736,588.00	145.02
Pendapatan BLUD	603,056,302,451.00	757,229,531,438.09	125.57
Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan	57,200,000.00	57,200,000.00	100.00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	25,000,000.00	34,265,665.00	137.06
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	2,075,300,000.00	2,517,673,500.00	121.32
JUMLAH	648,667,895,368.00	796,946,226,284.19	122.86

Sumber Data : Laporan Keuangan Kab. Sidoarjo Unaudited per tanggal 25 Februari 2022

f. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer tahun 2021 terealisasi sebesar Rp.2.521.918.383.870,00 atau 108,19% dari target yang ditetapkan sebesar Rp.2.331.099.589.317,00. Rincian target dan realisasi pendapatan dana perimbangan adalah sebagai berikut :

JENIS / OBYEK	ANGGARAN	REALISASI	%
	(Rp)	(Rp)	
PENDAPATAN TRANSFER	2,331,099,589,317.00	2,521,918,383,870.00	108.19
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1,674,648,082,317.00	1,716,490,317,781.00	102.50
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	317,151,507,000.00	315,483,708,200.00	99.47
Transfer Pemerintah Provinsi	339,300,000,000.00	489,944,357,889.00	144.40
JUMLAH	2,331,099,589,317.00	2,521,918,383,870.00	108.19

Sumber Data : Laporan Keuangan Kab. Sidoarjo Unaudited per tanggal 25 Februari 2022

g. Lain – Lain Pendapatan Yang Sah

Realisasi atas Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, terinci sebagai berikut :

JENIS / OBYEK	ANGGARAN	REALISASI	%
	(Rp)	(Rp)	
LAIN- LAIN PENDAPATAN YANG SAH	225,197,213,789.00	226,473,061,267.72	100.57
Pendapatan Hibah	177,238,450,000.00	174,790,689,148.53	98.62
Pendapatan Lainnya	47,958,763,789.00	51,682,372,119.19	107.76
JUMLAH	225,197,213,789.00	226,473,061,267.72	100.57

Sumber Data : Laporan Keuangan Kab. Sidoarjo Unaudited per tanggal 25 Februari 2022

F. Pengelolaan Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi khususnya dalam pemberian layanan umum. Otonomi daerah menuntut daerah untuk bisa mengelola secara efisien dan efektif belanja daerah untuk kesejahteraan masyarakat secara umum. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menerapkan pendekatan anggaran berbasis kinerja, sebagai upaya meningkatkan efektivitas kinerja pemerintah dan mengalokasikan belanja secara efisien

serta merencanakan anggaran secara transparan dan akuntabilitas. Pendekatan anggaran kinerja berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya.

Secara konsep, kebijakan anggaran belanja daerah harus mendukung target capaian pembangunan nasional sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintahan Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan juga digunakan untuk menadani pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, dan unsur pemerintahan umum. Pada jenis belanja yang bersifat strategis dengan nilai yang besar dapat dimungkinkan dengan menetapkan belanja dengan model pelaksanaan multi-years dan atau model pembayaran dengan turn-keys, yang pengalokasian dananya disepakati oleh DPRD dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan belanja untuk program dan kegiatan diarahkan untuk akselerasi pencapaian misi Kabupaten Sidoarjo sebagaimana berikut :

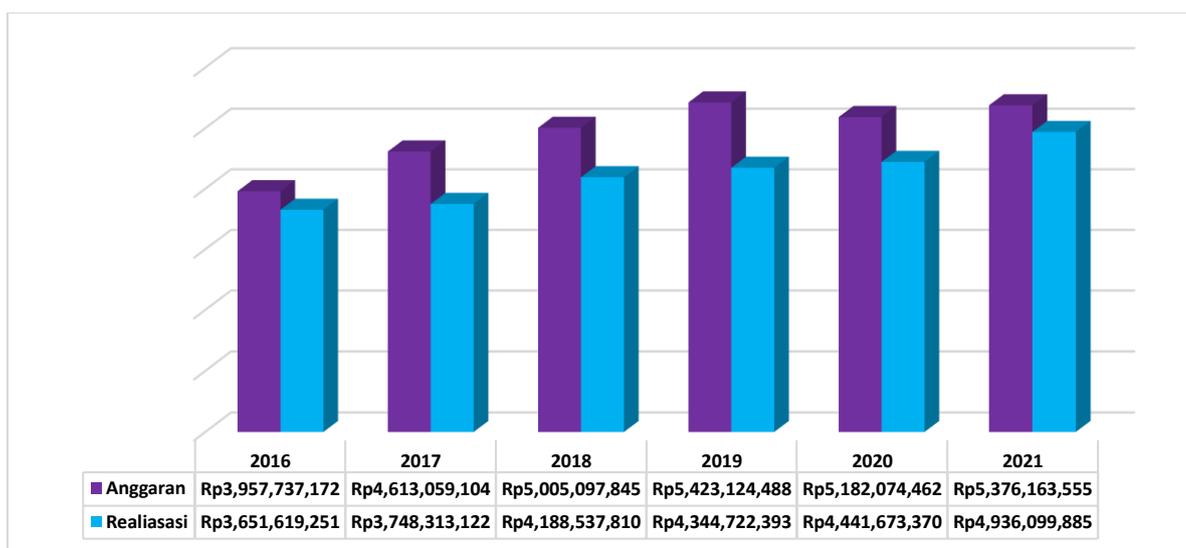
- 1) Melakukan efisiensi terhadap belanja operasional, antara lain belanja pegawai dan overhead cost di setiap Perangkat Daerah secara proporsional.
- 2) Belanja Daerah difokuskan pada urusan wajib pelayanan dasar dan 17 (tujuh belas) program prioritas yang memiliki kontribusi besar terhadap pencapaian visi misi pembangunan kabupaten Sidoarjo tahun 2021-2026,
- 3) Kebijakan selektif dalam pembangunan infrastruktur, yang akan diprioritaskan pada pemenuhan infrastruktur dasar yang mendukung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat.
- 4) Kebijakan matching program lintas Perangkat Daerah maupun dengan pihak swasta.

Target dan realisasi pendapatan daerah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tahun	Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	%
	(Rp.)	(Rp.)	
2016	Rp. 3.957.737.172.284,80	Rp. 3.651.619.251.558,26	92,27%
2017	Rp. 4.613.059.104.900,67	Rp. 3.748.313.122.059,10	81,25%
2018	Rp. 5.005.097.845.031,35	Rp. 4.188.537.810.911,10	83,69%
2019	Rp. 5.423.124.488.516,28	Rp. 4.344.722.393.986,67	80,11%
2020	Rp. 5.182.074.462.157,57	Rp. 4.441.673.370.394,65	85,71%
2021	Rp. 5.376.163.555.617,00	Rp. 4.936.099.885.354,76	91,81%

Sumber Data : Laporan Keuangan Kab. Sidoarjo, untuk Tahun 2016 s.d 2020 Audited, seangkan untuk Tahun 2021 Unaudited per tanggal 25 Februari 2022

Grafik I.8
Perkembangan Belanja Kabupaten Sidoarjo



Sumber Data : Laporan Keuangan Kab. Sidoarjo, untuk Tahun 2016 s.d 2020 Audited, seangkan untuk Tahun 2021 Unaudited per tanggal 25 Februari 2022

Target belanja daerah untuk tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp.5.376.163.555.617,00, dari target tersebut berhasil direalisasikan sebesar Rp.4.936.099.885.354,76 atau tercapai sebesar 91,81%, dengan rincian sebagai berikut :

KODE	URAIAN	ANGGARAN / TARGET	REALISASI	%
		(Rp)	(Rp)	
2	BELANJA DAERAH	5,376,163,555,617.00	4,936,099,885,354.76	91.81
2.1.	BELANJA OPERASI	3,560,645,958,978.00	3,295,658,462,944.69	92.56
2.2.	BELANJA MODAL	1,073,360,369,732.00	919,008,763,415.00	85.62
2.3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	75,110,000,000.00	56,550,687,585.07	75.29
2.4.	BELANJA TRANSFER	667,047,226,907.00	664,881,971,410.00	99.68
	JUMLAH BELANJA DAERAH	5,376,163,555,617.00	4,936,099,885,354.76	91.81

Sumber Data : Laporan Keuangan Kab. Sidoarjo Unaudited per tanggal 25 Februari 2022

Penjelasan lebih lanjut terhadap penyerapan belanja daerah sebagai berikut :

a. Belanja Operasi

Belanja Operasi pada tahun 2021 terealisasi sebesar Rp.3.295.658.462.944,69 atau 92,56% dari target yang ditetapkan sebesar Rp.3.560.645.958.978,00.

Rincian realisasi belanja operasi adalah sebagai berikut :

KODE	URAIAN	ANGGARAN / TARGET	REALISASI	%
		(Rp)	(Rp)	
2.1.	Belanja Operasi	3,560,645,958,978.00	3,295,658,462,944.69	92.56
2.1.1	Belanja Pegawai	1,690,813,768,611.00	1,620,047,237,731.00	95.81
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1,594,323,663,013.00	1,413,430,367,412.79	88.65
2.1.3	Belanja Subsidi	5,880,000,000.00	4,563,492,001.00	77.61
2.1.4	Belanja Hibah	155,090,239,117.00	147,342,921,799.90	95.00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	114,538,288,237.00	110,274,444,000.00	96.28
	JUMLAH	3,560,645,958,978.00	3,295,658,462,944.69	92.56

Sumber Data : Laporan Keuangan Kab. Sidoarjo Unaudited per tanggal 25 Februari 2022

b. Belanja Modal

Belanja Modal tahun 2021 terealisasi sebesar Rp.919.008.763.415,00 atau 85,62% dari target anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.1.073.360.369.732,700

Rincian realisasi belanja langsung adalah sebagai berikut :

KODE	URAIAN	ANGGARAN / TARGET	REALISASI	%
		(Rp)	(Rp)	
2.2.	BELANJA MODAL	1,073,360,369,732.00	919,008,763,415.00	85.62
2.2.1.	Belanja Modal Tanah	81,175,000,000.00	34,014,902,017.00	41.90
2.2.2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	351,231,977,235.00	308,230,302,940.00	87.76
2.2.3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	327,607,870,610.00	301,625,990,175.00	92.07
2.2.4.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	310,399,131,887.00	272,453,365,570.00	87.78
2.2.5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	620,690,000.00	546,754,325.00	88.09
2.2.5.	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	2,325,700,000.00	2,137,448,388.00	91.91
	Jumlah Belanja Modal	1,073,360,369,732.00	919,008,763,415.00	85.62

Sumber Data : Laporan Keuangan Kab. Sidoarjo Unaudited per tanggal 25 Februari 2022

Belanja modal tanah yang prosesnya belum selesai antara lain pembebasan lahan untuk pembangunan Frontage Road, dan pembangunan Puskesmas Sekardagangan.

c. Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer

Belanja Tidak Terduga tahun 2021 terealisasi sebesar Rp.56.550.687.585,07 atau 72,59% dari target anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.75.110.000.000,00

Belanja Transfer tahun 2021 terealisasi sebesar Rp.664.881.971.410,00 atau 99,68% dari target anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.667.047.226.907,00

Rincian realisasi belanja tidak terduga dan belanja transfer adalah sebagai berikut :

KODE	URAIAN	ANGGARAN / TARGET	REALISASI	%
		(Rp)	(Rp)	
2.3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	75,110,000,000.00	56,550,687,585.07	75.29
2.3.1.	Belanja Tidak Terduga	75,110,000,000.00	56,550,687,585.07	75.29
2.4.	BELANJA TRANSFER	667,047,226,907.00	664,881,971,410.00	99.68
2.4.1.	Belanja Bagi Hasil	103,475,932,807.00	103,200,571,603.00	99.73

2.4.2.	Belanja Bantuan Keuangan	563,571,294,100.00	561,681,399,807.00	99.66
--------	-----------------------------	--------------------	--------------------	-------

Sumber Data : Laporan Keuangan Kab. Sidoarjo Unaudited per tanggal 25 Februari 2022

G. Pengelolaan Pembiayaan Daerah

Sedangkan Arah Kebijakan Pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pada sisi penerimaan pembiayaan akan diarahkan kepada beberapa hal sebagai berikut :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu merupakan estimasi selisih lebih antara realisasi pendapatan dengan belanja daerah dan didefinisikan dalam perubahan APBD yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun sebelumnya. Silpa yang ditimbulkan oleh adanya keggalan penyerapan anggaran akan ditekan seminimal mungkin untuk memastikan APBD di tahun berkenaan dapat terserap dengan baik sesuai target yang telah ditentukan. Sedangkan Silpa yang diperoleh atas keberhasilan efisiensi anggaran yang tidak berdampak pada pengurangan target pembangunan apat terus dilakukan.

b. Penerimaan kembali pengembalian Dana Bergulir

Penerimaan kembali pengembalian dana bergulir digunakan untuk menganggarkan penerimaan yang berasal dari pengembalian angsuran pokok pinjaman dana bergulir. Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada jenis-jenis penerimaan pembiayaan daerah.

c. Alternatif Pendanaan Non APBD

Untuk menunjang kinerja pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga memiliki opsi alternatif pendanaan pembangunan daerah melalui beberapa kebijakan sebagai berikut :

1) Pinjaman Daerah

Konsep dasar pinjaman daerah dalam PP 54/2005 dan PP 30/2011 pada prinsipnya diturunkan dari UU 33/2004 tentang Perimbangan

Kuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dalam UU tersebut disebutkan bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, untuk memberikan alternatif sumber pembiayaan bagi pemerintah daerah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman daerah. Pinjaman daerah bersumber dari :

- I. Pemerintah Pusat, berasal dari APBN termasuk dana investasi Pemerintah, penerusan Pinjaman Dalam Negeri, dan/atau penerusan Pinjaman Luar Negeri;
 - II. Pemerintah Daerah lain;
 - III. Lembaga Keuangan Bank, yang berbadan hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - IV. Lembaga Keuangan Bukan Bank, yaitu lembaga pembiayaan yang berbadan hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, misalkan PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI); dan
 - V. Masyarakat, berupa Obligasi Daerah yang diterbitkan melalui penawaran umum kepada masyarakat di pasar modal dalam negeri.
- 2) Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU/PPP) KPBU merupakan kerjasama antara pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur dengan tujuan untuk kepentingan umum yang sebagian atau seluruh modalnya menggunakan sumber dari badan usaha dengan sebuah pembagian risiko antar para pihak. keterlibatan swasta bukan hanya akan mempercepat pembangunan infrastruktur, tapi juga meningkatkan efisiensi operasional serta menghasilkan kualitas pelayanan yang lebih tinggi bagi pengguna akhir.
- Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam

Penyediaan Infrastruktur. Pada saat ini telah diregulasi melalui Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) / Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan Peraturan Menteri PPN / Kepala Bappenas Nomor 4 tahun 2015 tentang pelaksanaan KPBU, melalui alternative skema pembiayaan ini, diharapkan terjadi percepatan dalam pembangunan di Jawa Timur, khususnya bidang infrastruktur publik.

3) Obligasi Pemerintah Daerah.

Obligasi daerah adalah salah satu sumber pinjaman daerah jangka menengah dan/atau jangka panjang yang bersumber dari Masyarakat, penerbitan obligasi daerah hanya dapat dilakukan di pasar modal domestik dan dalam mata uang rupiah, namun efek yang diterbitkan tidak dijamin oleh Pemerintah. Revenue Bond adalah salah satu jenis obligasi pendapatan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dan digunakan hanya untuk membiayai kegiatan investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang menjadi urusan Pemerintah Daerah.

4) Corporate Social Responsibility (CSR)

Kinerja pembangunan yang telah dicapai tidak terlepas dari dukungan semua pihak, termasuk Dunia Usaha melalui pelaksanaan pelaksanaan Penyelenggaraan Tanggungjawab Sosial Perusahaan (TSP) atau i (CSR) dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Peran Pemerintah daerah dalam kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) adalah memberikan data-data pembangunan pada bidang-bidang yang dapat menjadi item pilihan swasta untuk menyalurkan dana PKBL dan CSR-nya, sehingga pelaksanaan CSR/PKBL akan sangat membantu dalam pembiayaan program pembangunan pemerintah daerah. Oleh karena itu, peran tim fasilitasi CSR/PKBL harus lebih ditingkatkan, baik pada level provinsi maupun Kabupaten / Kota. Fasilitasi Penyelenggaraan Tanggungjawab Sosial Perusahaan (TSP), sebagai salah satu

bentuk kontribusi dunia usaha dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena kontribusi ini lebih didasarkan kepada kesukarelaan dan fasilitasi yang di berikan oleh pemerintah daerah diarahkan untuk memperluas dan mempercepat pencapaian target-target pembangunan daerah melalui penyediaan data base, sinergi dan sinkronisasi program, joint monitoring, dan pembinaan teknis.

5) Kemitraan dengan Lembaga Internasional/NGO

Pada pelaksanaan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang kerjasama daerah, maka diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang tata cara kerjasama daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri dan kerjasama daerah dengan lembaga di luar negeri. Kerjasama daerah ini merupakan sebagian urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan pilihan, yang menjadi kewenangan daerah, terdiri atas pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pertukaran budaya, peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan, dan promosi potensi daerah, serta objek kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lembaga Internasional disebut juga dengan 'NGO' (Non Governmental Organization) merupakan organisasi/lembaga internasional kegiatannya bertujuan memberikan bantuan atau pelayanan pada masyarakat secara sukarela. Keterlibatan Lembaga Internasional dalam proses pembangunan sebagai alternatif untuk menyelesaikan masalah keterbatasan sumberdaya yang dimiliki pemerintah, yaitu ketersediaan anggaran dalam menyediakan layanan publik serta bentuk partisipasi mitra pembangunan dalam kontribusinya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan manfaat dari mitra kerjasama ini diantaranya membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjangkau daerah yang sulit dan belum terjangkau oleh program pemerintah daerah, Transfer of knowledge, inovasi pemberdayaan masyarakat, dan hasil baik dapat direplikasikan ke daerah lain.

6) PINA

Pemerintah mengembangkan skema investasi yang murni tidak melibatkan Dana dari Pemerintah melalui Pembiayaan Investasi Non Anggaran (PINA), namun dapat berkolaborasi dengan proyek KPBU dalam pembangunan infrastruktur.

Pada sisi pengeluaran pembiayaan daerah Kabupaten Sidoarjo tahun 2021-2026 diarahkan pada :

1. Penutupan defisit riil anggaran tahun berjalan, dimana pengeluaran pembiayaan ini banyak ditopang di komponen SILPA,
2. Pembentukan dana cadangan untuk mengantisipasi belanja yang urgent di masa depan, antara lainantisipasi Pemilihan Umum (Pemilu) yang dilaksanakan pada tahun 2024.
3. Penyertaan Modal pada badan Usaha Milik Daerah (BUMD) kabupaten Sidoarjo. Dimana penyertaan modal ini bertujuan untuk memberikan stimulus kepada berkembangnya BUMD agar dapat memberikan peran yang lebih besar bagi penguatan ekonomi masyarakat.

Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Penerimaan utama pembiayaan dalam rangka menutup defisit anggaran adalah penerimaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu (SILPA), sedangkan yang kedua berasal dari penerimaan piutang daerah.

Struktur Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

PEMBIAYAAN DAERAH	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH (KURANG)
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Surplus/Defisit			838,918,142,285.00
Penerimaan Pembiayaan Daerah	1,108,082,329,166.00	1,109,326,717,092.78	1,244,387,926.78
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	1,106,084,911,309.00	1,106,084,911,309.00	0.00
Penerimaan Pengembalian Dana Bergulir	1,997,417,857.00	3,241,805,783.78	1,244,387,926.78

Pengeluaran Pembiayaan daerah	2,700,000,000.00	1,866,000,000.00	(834,000,000.00)
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah			
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	2,700,000,000.00	1,866,000,000.00	(834,000,000.00)
Badan Usaha Swasta			
Pembiayaan Netto	1,105,382,329,166.00	1,107,460,717,093.00	2,078,387,927.00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran			840,996,530,211.00

Sumber Data : Laporan Keuangan Kab. Sidoarjo Unaudited per tanggal 25 Februari 2022